

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Laporan keuangan merupakan elemen penting dalam dunia bisnis dan akuntansi karena menjadi alat utama untuk menyampaikan informasi keuangan suatu perusahaan kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut (SAK, 2009). Pernyataan ini menggarisbawahi peran laporan keuangan dalam memberikan gambaran komprehensif tentang posisi keuangan, kinerja, serta arus kas perusahaan selama periode tertentu, yang sangat penting bagi pemilik, manajemen, kreditur, investor, dan pemangku kepentingan lainnya. Keberadaan standar yang ditetapkan oleh PSAK, laporan keuangan diharapkan memenuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, sehingga dapat diandalkan sebagai dasar evaluasi dan perencanaan strategis untuk masa depan.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2009 memberikan pedoman penting dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di Indonesia. Standar ini menekankan prinsip-prinsip utama seperti transparansi, relevansi, keandalan, dan akuntabilitas dalam setiap tahap penyusunan laporan keuangan. Transparansi memastikan bahwa informasi keuangan disajikan secara jelas dan mudah dipahami, sementara relevansi memastikan bahwa data yang disajikan berguna bagi pengambil keputusan. Keandalan menggambarkan pentingnya data yang akurat

dapat dipercaya, sedangkan akuntabilitas mengharuskan entitas untuk mempertanggungjawabkan laporan keuangan mereka. Dengan demikian, PSAK Nomor 1 menjadi acuan utama bagi perusahaan dalam menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Laporan keuangan dikatakan berkualitas jika memiliki empat karakteristik utama laporan keuangan. Karakteristik tersebut meliputi relevansi, yaitu kemampuan informasi dalam laporan keuangan untuk memengaruhi keputusan ekonomi pengguna; keandalan, yang berarti informasi dalam laporan harus bebas dari kesalahan material dan bias sehingga dapat dipercaya; keterpahaman, yakni Penyampaian informasi secara jelas dan mudah dimengerti oleh pengguna yang memiliki pemahaman dasar tentang akuntansi; serta keterbandingan, yang memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi performa keuangan suatu entitas dengan entitas lain atau dengan periode sebelumnya. Keempat karakteristik tersebut berfungsi sebagai acuan utama dalam menyusun laporan keuangan yang mampu memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan (PSAK 2021).

Tata kelola perusahaan atau *Good corporate governance* berperan penting terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. *Good corporate governance* mencakup prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan yang berfungsi menjaga agar laporan keuangan menggambarkan keadaan keuangan perusahaan dengan tepat dan transparan. Sistem pengendalian internal juga menjadi faktor yang tak kalah penting, pengendalian internal yang efektif mampu mendeteksi dan mencegah kesalahan atau kecurangan dalam pelaporan keuangan (Arens et al., 2017). Selain itu, praktik audit eksternal yang dilakukan oleh auditor independen dapat meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap laporan keuangan.

Teknologi informasi turut mendorong peningkatan mutu laporan keuangan. Penggunaan sistem informasi akuntansi yang terpercaya mampu mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Temuan penelitian Romney dan Steinbart (2020) mendukung pernyataan ini dengan menunjukkan bahwa penggunaan teknologi akuntansi modern oleh perusahaan cenderung menghasilkan laporan keuangan yang lebih tepat dan efisien. Selain itu, kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan merupakan faktor krusial. Pembinaan yang dilakukan secara terus-menerus dan sertifikasi profesional dapat meningkatkan kemampuan akuntan untuk menyusun laporan keuangan dengan mutu yang tinggi (Mulyadi, 2016).

Faktor eksternal berpengaruh signifikan terhadap mutu laporan keuangan perusahaan. Aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga pengawas pasar modal menyediakan landasan yang ketat guna memastikan kepatuhan perusahaan terhadap prinsip akuntansi yang diakui secara umum. Standar pelaporan keuangan internasional, seperti IFRS, telah menjadi panduan utama bagi banyak negara dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, sehingga memungkinkan adanya keseragaman dan transparansi dalam penyajian laporan keuangan lintas negara (IFRS Foundation, 2020). Selain itu, tekanan dari pasar, terutama dari para investor, juga menjadi pendorong signifikan. Investor cenderung menuntut informasi keuangan yang transparan, relevan, dan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan investasi mereka. Tekanan ini memotivasi perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas laporannya agar dapat memenuhi harapan para pemangku kepentingan. Kombinasi antara regulasi yang ketat dan tekanan pasar tersebut menciptakan lingkungan yang mendorong perusahaan untuk lebih

bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan mereka, sehingga kualitas laporan keuangan dapat terus terjaga dan ditingkatkan.

Hasil penelitian empiris mengindikasikan bahwa kualitas laporan keuangan berdampak positif terhadap kinerja perusahaan. Laporan keuangan yang baik mampu meningkatkan kepercayaan investor dan kreditur, serta mempermudah perusahaan dalam memperoleh pendanaan yang dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan usaha (Dechow et al., 2010). Kualitas laporan keuangan yang baik juga berperan penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap integritas perusahaan, sehingga dapat memperkuat reputasi perusahaan di pasar. Upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas laporan keuangan menjadi tanggung jawab penting yang harus dilakukan perusahaan secara berkelanjutan. Strategi yang dapat diterapkan mencakup penguatan tata kelola perusahaan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, Pengembangan kemampuan sumber daya manusia melalui pelatihan yang sesuai, disertai dengan investasi pada teknologi akuntansi mutakhir yang dapat menunjang penyajian informasi keuangan secara lebih tepat dan efisien. Langkah-langkah tersebut tidak hanya membantu perusahaan memenuhi standar pelaporan yang berlaku, tetapi juga menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

Laporan keuangan memiliki peran fundamental dalam menyajikan informasi yang relevan dan andal bagi berbagai pihak yang membutuhkan, terutama dalam konteks pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan sebagai alat komunikasi utama yang digunakan oleh entitas, Laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi tentang kondisi keuangan, hasil operasional, serta arus kas perusahaan dalam periode waktu tertentu.

Lembaga keuangan syariah hadir sebagai respons atas belum terpenuhinya berbagai kebutuhan masyarakat, sehingga dikembangkan program-program pembiayaan sosial berbasis syariah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan salah satu lembaga yang mengelola dana zakat, infak, dan sedekah untuk disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya (Mudzakir, dkk, 2024). Zakat berfungsi sebagai sarana untuk mengurangi kesenjangan antara golongan kaya dan miskin, yang jika dibiarkan dapat memicu risiko besar seperti kerusuhan hingga terjadinya revolusi sosial (Setiawan, 2019).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2010 menetapkan PSAK No. 109 sebagai standar akuntansi yang mengatur pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah di lembaga zakat. Standar ini mencakup aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan transaksi. Penerapan PSAK tersebut menjadi langkah penting dalam meningkatkan akuntabilitas lembaga zakat di Indonesia (Yulianti, 2021).

Laporan keuangan memiliki tujuan utama untuk menyampaikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja usaha, dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi para pengguna dalam membuat keputusan ekonomi, meskipun para pengguna tersebut tidak memiliki hak untuk meminta laporan yang disusun sesuai dengan kebutuhan informasi mereka secara spesifik (SAK ETAP, 2009). Selain itu, laporan keuangan berfungsi untuk menunjukkan bagaimana manajemen telah melaksanakan tanggung jawabnya dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya, atau dikenal sebagai aspek *stewardship*. Informasi ini penting bagi para pemangku kepentingan seperti pemilik, investor, kreditur, dan pihak lainnya dalam mengevaluasi kinerja perusahaan serta mempertimbangkan

langkah-langkah strategis di waktu yang akan datang. Dengan demikian, laporan keuangan menjadi instrumen yang sangat vital dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi operasional sebuah entitas.

Kualitas laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang bertujuan untuk menyajikan informasi yang relevan dan andal. Informasi ini berguna sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan tersebut (Indra Bastian 2010:9). Kualitas laporan keuangan suatu perusahaan sangat bergantung pada sejauh mana informasi yang disajikan dapat memberikan manfaat bagi para pengguna, serta bagaimana laporan tersebut disusun sesuai dengan kerangka konseptual, prinsip-prinsip dasar, dan tujuan akuntansi. Tinggi rendahnya kualitas suatu perusahaan dapat tercermin dari kondisi kesehatannya. Perusahaan yang berada dalam kondisi sehat cenderung menghasilkan laporan keuangan yang baik dan bebas dari penyimpangan. Laporan keuangan juga berfungsi sebagai alat untuk menilai atau mengukur tingkat kualitas perusahaan oleh para pengguna laporan tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah penyajian yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan (PP No. 71, 2010). Karakteristik kualitatif dalam laporan keuangan merupakan ukuran normatif yang harus tercermin dalam informasi akuntansi agar tujuan pelaporan dapat tercapai. Tujuan utama dari laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas entitas pelaporan. Informasi ini sangat berguna bagi para pengguna dalam membuat serta mengevaluasi keputusan terkait alokasi sumber

daya. Kualitas atau mutu sendiri dapat diartikan sebagai tingkatan baik atau buruknya suatu hal, sehingga karakteristik kualitatif perlu dipenuhi agar laporan keuangan dapat dinilai sebagai laporan yang berkualitas.

Kualitas laporan keuangan memainkan peran penting dalam memastikan informasi yang disajikan relevan, andal, dan mendukung pengambilan keputusan strategis di sebuah organisasi. Sebagai alat utama untuk mengevaluasi kinerja keuangan, laporan keuangan berkualitas memungkinkan pemangku kepentingan seperti investor, kreditur, dan regulator untuk membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang jelas dan transparan (Malekinejad, 2016). Penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelaksanaan audit internal yang efektif mampu memperbaiki mutu laporan keuangan hingga 50,5%, yang berdampak positif pada pengambilan keputusan organisasi (Yusup & Juhara, 2020). Selain itu, kualitas laporan keuangan dipengaruhi secara signifikan oleh faktor seperti keahlian sumber daya manusia, pelaksanaan pengendalian internal, serta pemanfaatan teknologi yang memadai. Penelitian di Universitas Hasanuddin menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan sumber daya manusia berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga pelatihan dan pengembangan menjadi hal yang perlu diprioritaskan oleh organisasi (Junaedi et al., 2019).

Pengaruh laporan keuangan yang berkualitas tidak hanya terbatas pada keputusan internal organisasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan investor dan meningkatkan daya tarik investasi. Kualitas informasi keuangan yang tinggi meningkatkan transparansi, mengurangi biaya modal, dan membangun kepercayaan di pasar modal (Moridu, 2023). Dengan demikian, penyusunan laporan keuangan perlu mengacu pada prinsip relevansi dan keandalan selaras

dengan standar akuntansi yang diterapkan, seperti *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP) (Lativa, 2024).

Pemerintah menunjukkan komitmennya terhadap prinsip transparansi atau keterbukaan melalui pengesahan dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait kebijakan publik dan proses pembangunan. Masyarakat memperoleh hak untuk mengetahui informasi secara bebas, jujur, dan tanpa diskriminasi. Pemerintah melaksanakan tata kelola pemerintahan yang transparan sebagai bentuk kesadaran bersama dalam mendukung reformasi sistem pemerintahan demokratis. Pemerintah diwajibkan untuk bersikap terbuka terhadap berbagai kebijakan dan program yang dijalankan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 58 menetapkan kewajiban bagi Presiden sebagai Kepala Pemerintahan untuk melaksanakan sistem pengendalian intern secara menyeluruh di lingkungan pemerintahan. Pemerintah melalui sistem ini dapat mengawasi seluruh aktivitas yang berlangsung di tingkat Pemerintah Pusat maupun Daerah beserta unit-unit kerjanya. Selain itu, sistem pengendalian intern memungkinkan pemerintah untuk mencapai sasaran secara efisien dan efektif, menyajikan laporan pengelolaan keuangan negara secara andal, melindungi aset negara, serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, penjelasan umum).

Penemuan penting dari penelitian ini adalah bahwa BAZNAS Kabupaten Bogor hanya mempublikasikan total penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS tanpa melampirkan laporan keuangan lengkap, baik yang telah diaudit maupun

yang belum diaudit. Berdasarkan hasil wawancara, pihak BAZNAS mengungkapkan bahwa laporan keuangan dianggap sebagai dokumen rahasia yang tidak perlu diakses oleh publik. Mereka beranggapan bahwa masyarakat umum tidak memiliki kepentingan untuk mengetahui detail pengelolaan dana ZIS, terutama karena sebagian besar masyarakat tidak berpartisipasi langsung dalam pembayaran zakat. Pandangan ini menimbulkan tantangan serius terhadap prinsip transparansi yang seharusnya dipegang oleh lembaga pengelola zakat (Hasil wawancara dengan Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Bogor, 9/12/2024). Selain itu, staff bagian keuangan mengungkapkan bahwa kendala yang dialami BAZNAS Kabupaten Bogor dalam menerapkan transparansi adalah kurang andalnya staff bagian pelaporan yang menyebabkan penerapan transparansi kepada publik terkendala (Hasil wawancara dengan staff bagian keuangan 22/01/2025).

Permasalahan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kepercayaan publik terhadap BAZNAS Kabupaten Bogor. Transparansi dalam pengelolaan dana ZIS adalah elemen penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran zakat, infak, dan sedekah. Ketika masyarakat merasa bahwa pengelolaan dana dilakukan secara transparan dan akuntabel, mereka akan lebih percaya kepada lembaga pengelola zakat dan lebih termotivasi untuk berkontribusi. Sebaliknya, kurangnya transparansi dapat menghambat upaya BAZNAS dalam membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat dan meningkatkan penerimaan ZIS di masa mendatang.

Kurangnya transparansi ini diperburuk oleh fakta bahwa laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bogor belum memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Padahal, di dalam

lembaga tersebut terdapat audit internal yang seharusnya berfungsi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Idealnya, keberadaan audit internal dapat membantu BAZNAS Kabupaten Bogor mencapai predikat WTP atau WDP sebagai indikator bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Namun, fakta menunjukkan bahwa audit internal yang ada belum mampu secara efektif mendorong perbaikan sistem pengelolaan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal di BAZNAS Kabupaten Bogor masih belum optimal. Sebuah sistem pengendalian internal yang efektif adalah dasar dari penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Ketika sistem pengendalian internal berjalan dengan baik, maka penyusunan laporan keuangan juga akan sesuai dengan prinsip akuntansi dan memenuhi kriteria kualitas yang diharapkan.

Hasil wawancara dengan staff keuangan diketahui bahwa BAZNAS Kabupaten Bogor telah mengajukan pemeriksaan pada pihak KAP, akan tetapi BAZNAS Kabupaten Bogor belum juga mendapatkan opini dari pihak KAP sehingga tidak ada opini dari KAP yang dipublish di website (Hasil wawancara dengan staff keuangan 22/01/2025). Kondisi ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam kualitas laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bogor. Secara ideal, keberadaan audit internal dan sistem pengendalian internal seharusnya mampu memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun memenuhi standar akuntansi yang berlaku sehingga dapat memperoleh opini wajar dari KAP. Namun, kenyataannya meskipun mekanisme pengawasan internal telah diterapkan, hal tersebut belum cukup untuk menjamin bahwa laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bogor dapat mempertahankan opini yang baik. Situasi ini menunjukkan

perlunya evaluasi dan perbaikan dalam penerapan sistem pengendalian internal guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.

Permasalahan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kepercayaan publik terhadap BAZNAS Kabupaten Bogor. Transparansi dalam pengelolaan dana ZIS adalah elemen penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran zakat, infak, dan sedekah. Ketika masyarakat merasa bahwa pengelolaan dana dilakukan secara transparan dan akuntabel, mereka akan lebih percaya kepada lembaga pengelola zakat dan lebih termotivasi untuk berkontribusi. Sebaliknya, kurangnya transparansi dapat menghambat upaya BAZNAS dalam membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat dan meningkatkan penerimaan ZIS di masa mendatang.

Penerapan transparansi dalam sistem pelaporan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan kurang andalnya sumber daya manusia di BAZNAS Kabupaten Bogor. Selain itu, upaya maksimal dalam pemantauan berkala, seleksi ketat dalam perekrutan pegawai, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung turut memengaruhi transparansi dan sistem pengendalian internal. Faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas laporan keuangan yang dituntut untuk memenuhi karakteristik kualitatif seperti keandalan, relevansi, keterpahaman, dan keterbandingan. Salah satu isu yang muncul berkaitan dengan hasil audit akuntan publik terhadap laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bogor dalam beberapa tahun terakhir. Berikut adalah hasil pemeriksaan tersebut:

**Tabel 1.1** Hasil KAP Tahun 2016-2024

<b>Tahun</b>	<b>Opini</b>
2016	Belum mendapatkan Opini
2017	Belum mendapatkan Opini
2018	Belum mendapatkan Opini
2019	Belum mendapatkan Opini
2020	Belum mendapatkan Opini
2021	Belum mendapatkan Opini
2022	Belum mendapatkan Opini
2023	Belum mendapatkan Opini
2024	Belum mendapatkan Opini

*Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Bogor*

Data hasil pemeriksaan akuntan publik terhadap laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bogor dari tahun 2016-2024, menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tersebut BAZNAS Kabupaten Bogor belum mendapatkan opini dari Kantor Akuntan Publik (KAP). Kondisi ini menunjukkan adanya permasalahan dalam kualitas laporan keuangan yang disajikan, mengingat selama lima tahun berturut-turut laporan keuangan tersebut belum memperoleh penilaian resmi. Ketidakmampuan dalam memperoleh opini mengindikasikan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan masih perlu ditingkatkan. Opini KAP sangat penting untuk menilai kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku. Tidak adanya opini dari KAP dapat mengarah pada persepsi bahwa terdapat kelemahan dalam sistem pelaporan keuangan, baik dari segi penyajian, kepatuhan terhadap standar akuntansi, maupun efektivitas sistem pengendalian internal. Hal ini juga mengindikasikan bahwa mekanisme audit internal yang diterapkan di BAZNAS Kabupaten Bogor belum sepenuhnya mampu memastikan kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

**Tabel 1. 2** Data Penghimpunan Dana ZIS

<b>Tahun</b>	<b>Total Penghimpunan Dana ZIS</b>
2016	1.104.618.887
2017	880.653.000
2018	1.718.834.617
2019	2.806.675.360
2020	1.148.142.727
2021	1.123.158.717
2022	2.273.315.840
2023	2.769.031.469
2024	2.328.436.691

*Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Bogor*

Data penghimpunan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) BAZNAS Kabupaten Bogor dari tahun 2016 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2016, total penghimpunan tercatat sebesar Rp1.104.618.887. Angka ini justru menurun di tahun 2017 menjadi Rp880.653.000, sebelum melonjak drastis pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing menjadi Rp1.718.834.617 dan Rp2.806.675.360. Namun demikian, pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup tajam menjadi Rp1.148.142.727 dan hanya mengalami sedikit peningkatan di tahun 2021 sebesar Rp1.123.158.717. Meskipun pada tahun 2022 dan 2023 terjadi kenaikan kembali hingga mencapai puncaknya di Rp2.769.031.469, namun tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi Rp2.328.436.691.

Penurunan penghimpunan dana yang terjadi pada tahun-tahun tertentu, seperti 2017, 2020, 2021, dan 2024, dapat dihubungkan dengan faktor internal kelembagaan, khususnya menyangkut kurangnya transparansi dan belum optimalnya sistem pengendalian internal. Keterbatasan dalam menyajikan laporan keuangan secara lengkap dan terbuka kepada publik, serta ketidakteraturan dalam

memperoleh opini audit dari Kantor Akuntan Publik, berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat. Ketika publik meragukan akuntabilitas pengelolaan dana ZIS, partisipasi mereka dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah melalui lembaga resmi seperti BAZNAS menjadi menurun. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi yang rendah dan sistem pengendalian internal yang belum berjalan efektif bukan hanya memengaruhi kualitas laporan keuangan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kinerja penghimpunan dana ZIS secara keseluruhan.

Peran audit internal sebagai salah satu mekanisme pengawasan menjadi fokus utama. Audit internal bertujuan untuk memastikan bahwa proses pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan dana berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Namun, temuan menunjukkan bahwa efektivitas audit internal di BAZNAS Kabupaten Bogor masih perlu ditingkatkan. Keberadaan audit internal saja tidak cukup untuk menjamin kualitas laporan keuangan jika tidak didukung oleh komitmen manajemen dalam meningkatkan sistem pengendalian internal dan penerapan tata kelola yang baik. Menurut teori tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip utama yang harus diterapkan oleh setiap lembaga, termasuk lembaga pengelola zakat.

Penelitian oleh Anggie Rizka S., Zamzami, dan Muhammad Gowon (2021) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi kompetensi dan efektivitas pengendalian internal, semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Selain itu, Destipa Imelia, Sri Rahayu, dan Wiralestari (2021) menemukan bahwa kompetensi sumber daya

manusia, partisipasi dalam penyusunan anggaran, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal secara bersama-sama mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi dan pengawasan dalam proses penyusunan laporan keuangan.

Sistem pengendalian internal (SPI) yang baik memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hal ini dijelaskan oleh penelitian yang menunjukkan bahwa implementasi SPI yang efektif dapat mengurangi kesalahan, manipulasi, dan penyimpangan dalam pencatatan keuangan, yang pada akhirnya meningkatkan akurasi dan keandalan laporan keuangan yang disusun oleh entitas. Menurut COSO (2013), pengendalian internal yang kuat dapat memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan keadaan yang sesungguhnya, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Pengendalian internal yang baik mencakup komponen-komponen seperti pemisahan tugas, otorisasi, pengawasan, serta pelaporan yang transparan, yang bersama-sama membantu mengurangi risiko kesalahan manusia atau fraud yang dapat merusak kualitas laporan. Tuan & Ly (2022) juga mengungkapkan bahwa pengendalian internal yang efektif berhubungan langsung dengan kualitas laporan keuangan yang lebih baik, karena kontrol yang baik mencegah ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, SPI yang diterapkan dengan baik memberikan jaminan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan akan lebih andal, relevan, dan transparan.

Hasil dari pemaparan di atas menunjukkan terdapat kesenjangan dalam penelitian ini terletak pada perbedaan antara kondisi ideal yang dijelaskan dalam

teori dengan realitas yang ditemukan di lapangan terkait pengelolaan dan pelaporan keuangan oleh BAZNAS Kabupaten Bogor. Berdasarkan teori kualitas laporan keuangan, seperti yang disampaikan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan penelitian-penelitian sebelumnya, laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, relevansi, dan keandalan. Selain itu, laporan tersebut seharusnya dapat digunakan oleh berbagai pihak untuk pengambilan keputusan ekonomi. Namun, kenyataannya, BAZNAS Kabupaten Bogor hanya mempublikasikan data total penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS tanpa melampirkan laporan keuangan secara lengkap, baik yang telah diaudit maupun yang belum diaudit. Hal ini bertentangan dengan konsep transparansi yang menjadi elemen dasar dalam tata kelola yang baik (*good governance*). Selain itu, meskipun audit internal telah dilakukan, laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bogor belum mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari pihak KAP. Berdasarkan teori pengendalian internal, audit internal yang efektif seharusnya mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan memastikan bahwa proses pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan audit internal dan sistem pengendalian internal belum cukup untuk mencapai kualitas laporan keuangan yang optimal. Hal ini menandakan adanya kelemahan dalam implementasi sistem pengendalian internal yang memengaruhi kualitas laporan keuangan secara keseluruhan.

Teori transparansi dan sistem pengendalian internal menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan pengawasan keuangan sebagai dasar tata kelola yang baik. Namun, kondisi di BAZNAS Kabupaten Bogor menunjukkan

adanya kesenjangan nyata antara teori dan praktik. Secara teori, lembaga pengelola zakat dituntut untuk menyediakan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai standar akuntansi guna membangun kepercayaan publik. Di sisi lain, fakta lapangan menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Bogor hanya mempublikasikan data total penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS tanpa menyertakan laporan keuangan lengkap yang telah diaudit, dengan alasan bahwa dokumen tersebut bersifat rahasia dan tidak relevan bagi masyarakat. Selain itu, meskipun secara struktural telah dibentuk audit internal, laporan keuangan lembaga ini belum pernah memperoleh opini dari Kantor Akuntan Publik selama periode 2016–2024, yang mencerminkan lemahnya implementasi pengendalian internal yang seharusnya menjamin kualitas laporan keuangan. Permasalahan ini diperburuk oleh rendahnya kompetensi SDM, keterbatasan sarana pendukung, dan lemahnya mekanisme pelaporan. Padahal, secara teoritis, pengendalian internal yang efektif harus mampu memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara efisien, sesuai prosedur, dan bebas dari kesalahan material. Ketidaksesuaian ini menunjukkan bahwa meskipun struktur dan kebijakan telah ada, penerapannya di BAZNAS Kabupaten Bogor masih jauh dari ideal.

Kualitas laporan keuangan suatu instansi ditentukan oleh sejauh mana laporan tersebut memenuhi empat indikator utama, yaitu relevansi, keandalan, keterpahaman, dan keterbandingan. Keempat indikator ini merupakan prinsip dasar dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang bertujuan agar laporan keuangan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan.

Prinsip transparansi dalam pengelolaan informasi publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,

yang mewajibkan badan publik untuk membuka akses informasi secara jujur, akurat, dan tidak diskriminatif. Selain itu, penguatan sistem pengendalian internal telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 58 tentang Perbendaharaan Negara dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang bertujuan memastikan tercapainya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan efisien. Namun, implementasi prinsip-prinsip tersebut di BAZNAS Kabupaten Bogor masih belum optimal. Rendahnya tingkat keandalan dalam pelaksanaan transparansi serta lemahnya sistem pengendalian internal berdampak langsung pada rendahnya kualitas laporan keuangan lembaga tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa penerapan transparansi dan pengendalian internal yang memadai sesuai regulasi, indikator-indikator kualitas laporan keuangan tidak dapat terpenuhi secara optimal.

Dengan demikian, penelitian ini menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan penguatan sistem pengendalian internal sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bogor. Temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi BAZNAS Kabupaten Bogor dan lembaga serupa lainnya dalam memperbaiki pengelolaan dana ZIS dan membangun kepercayaan masyarakat. Keberhasilan dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah tidak hanya diukur dari seberapa besar dana yang dihimpun dan didistribusikan, tetapi juga dari sejauh mana lembaga tersebut mampu menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaannya.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, adanya kesenjangan antara hasil penelitian yang ada, serta perbedaan antara teori dengan praktik di lapangan,

penulis melakukan penelitian lebih lanjut mengenai "**Pengaruh Transparansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada BAZNAS Kabupaten Bogor**". Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan dalam literatur yang ada, serta memberikan rekomendasi praktis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan di lembaga zakat, sekaligus memperkuat sistem pengendalian internal yang ada di lembaga-lembaga tersebut.

Fenomena kesenjangan antara teori dan praktik di lapangan, serta perbedaan hasil penelitian sebelumnya, menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai "**Pengaruh Transparansi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada BAZNAS Kabupaten Bogor**". Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengisi kekurangan literatur yang masih terbatas, serta menawarkan rekomendasi praktis yang relevan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat sistem pengendalian internal pada lembaga-lembaga pengelola zakat.

#### B. Identifikasi Masalah

Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi unsur relevansi, keandalan, keterbandingan, dan keterpahaman. BAZNAS Kabupaten Bogor belum mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap dan belum memperoleh opini audit dari Kantor Akuntan Publik yang menunjukkan adanya permasalahan dalam aspek transparansi. Sistem pengendalian internal yang belum berjalan optimal juga menjadi kendala, ditandai dengan kurangnya monitoring dan keterbatasan kompetensi staf pelaporan. Penelitian ini mengidentifikasi dua variabel yang

relevan, yaitu transparansi dan sistem pengendalian internal untuk dianalisis pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pada BAZNAS Kabupaten Bogor.

### C. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada pengaruh transparansi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada BAZNAS Kabupaten Bogor. Untuk menjaga fokus dan menghindari perluasan pembahasan, penelitian dibatasi hanya pada tiga variabel, yaitu transparansi (X1), sistem pengendalian internal (X2), dan kualitas laporan keuangan (Y).

Variabel transparansi (X1) diartikan sebagai keterbukaan dalam menyampaikan informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkan (Rini, 2021), dengan indikator: publikasi laporan keuangan secara berkala, aksesibilitas informasi, dan audit independen. Variabel sistem pengendalian internal (X2) merujuk pada proses yang memberikan keyakinan memadai terhadap pencapaian tujuan operasional, pelaporan, dan kepatuhan (Nurhayati, 2022), dengan indikator: aktivitas pengendalian, pemisahan tugas, penilaian risiko, dan pemantauan. Kualitas laporan keuangan (Y) didefinisikan sebagai kemampuan laporan dalam menyajikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami (Sutrisno, 2022), dengan indikator: relevansi, keandalan, keterbandingan, dan keterpahaman. Ketiga variabel tersebut diukur menggunakan skala ordinal yang kemudian ditransformasikan menjadi data interval melalui metode Successive Interval (MSI). Penelitian ini tidak mencakup variabel lain di luar ruang lingkup tersebut.

#### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Bogor?
3. Bagaimana pengaruh transparansi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Bogor?

#### E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Bogor.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Bogor.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan transparansi dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Bogor.

#### F. Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam, khususnya mengenai pengaruh transparansi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk tidak hanya memperkaya pengetahuan akademis, tetapi juga memberikan wawasan praktis yang dapat meningkatkan pengelolaan dana zakat, serta mempertemukan teori dengan praktik di dunia nyata.

### 2. Manfaat Praktis

Bagi lembaga zakat yang menjadi objek penelitian, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi manajemen dalam menyusun dan menyampaikan informasi terkait pengelolaan lembaga zakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu dalam menentukan strategi dan pengambilan keputusan yang lebih baik untuk periode yang akan datang, dengan memperhatikan kualitas laporan keuangan dan sistem pengendalian yang ada.

## G. Jadwal Penelitian

Tabel 1. 3 Jadwal Penelitian

No	Bulan Kegiatan	Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penyusunan Proposal	x	x																						
2.	Konsultasi	x	x	x		x													x	x	x		x		
3.	Revisi Proposal	x	x	x																					
4.	Pengumpulan Data	x	x	x	x							x	x	x	x	x	x								
5.	Analisis Data																	x	x	x					
6.	Penulisan Akhir Naskah Skripsi																		x	x	x				
7.	Pendaftaran Munaqasyah																						x		